

Katalog : 4102002.3305

# 2022

## INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA Kabupaten Kebumen

<https://kebumenkab.bps.go.id>



**Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Kebumen**



**2022**

---

**INDEKS  
PEMBANGUNAN  
MANUSIA**  
Kabupaten Kebumen

<https://kebumen.go.id>

# INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

## KABUPATEN KEBUMEN 2022

No. Publikasi: 33050.2240

Katalog: 4102002.3305

Ukuran Buku: 18,2 cm x 25,7 cm

Jumlah Halaman: viii + 54 halaman

**Naskah:**

Fungsi Neraca dan Wilayah Analisis Statistik BPS Kabupaten Kebumen

**Penyunting:**

Fungsi Neraca dan Wilayah Analisis Statistik BPS Kabupaten Kebumen

**Gambar Sampul:**

Fungsi Neraca dan Wilayah Analisis Statistik BPS Kabupaten Kebumen

**Diterbitkan oleh:**

©BPS Kabupaten Kebumen

**Dicetak oleh:**

CV. Retsmart Grafindo

**Sumber Ilustrasi:**

canva.com

*“Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.”*

## Tim Penyusun

Pengarah : Kus Haryono, S.ST., M.Si.

Editor : Moh. Mukhaeri, S.ST.  
Peni Wahyu Dwi Winarsih, S.Stat.  
Suharto

Penulis : Dwi Agus Styawan, S.Si. M.Sc.

Desain dan Tata Letak : Dwi Agus Styawan, S.Si. M.Sc.

<https://kebud.kab.go.id>



## KATA PENGANTAR

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator capaian pembangunan kualitas hidup masyarakat yang disusun berdasarkan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Angka IPM yang disajikan secara periodik setiap tahun bertujuan untuk mengetahui capaian pembangunan manusia di Kebumen, baik dari sisi capaian IPM secara umum maupun dimensi-dimensi penyusunnya.

IPM Kabupaten Kebumen tahun 2022 telah mencapai 70,79. Dengan capaian IPM tersebut, Kebumen berada pada posisi status pembangunan manusia kategori 'tinggi'. Capaian tersebut mengantarkan Kebumen pada posisi 26 dari 35 kabupaten/kota dalam pencapaian pembangunan manusia di Jawa Tengah. Pencapaian dan kemajuan tersebut, menyisakan pekerjaan dan tugas yang tidak ringan, terutama terkait dengan dimensi standar hidup layak.

Semoga publikasi ini dapat memberikan gambaran terkait dengan pembangunan manusia di Kebumen. Publikasi ini diharapkan juga dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam melaksanakan perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan manusia di Kebumen pada masa mendatang.

Kebumen, November 2022  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Kebumen



Kus Haryono, S.ST., M.Si.

<https://kebumenkab.bps.go.id>

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I. PENGUKURAN PEMBANGUNAN MANUSIA .....</b>	<b>3</b>
1.1. Perkembangan Pengukuran Pembangunan.....	3
1.2. Pembangunan Manusia sebagai Perluasan Pilihan.....	5
1.3. Perkembangan Pengukuran Pembangunan Manusia.....	8
1.4. Dimensi dan Indikator Pembangunan Manusia.....	11
<b>BAB II. CAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA .....</b>	<b>17</b>
2.1. Pandemi dan Pembangunan Manusia .....	17
2.1. Capaian Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat .....	18
2.1. Capaian Dimensi Pengetahuan .....	20
2.1. Capaian Dimensi Standar Hidup Layak .....	22
<b>BAB III. PERBANDINGAN IPM KEBUMEN .....</b>	<b>27</b>
3.1. Perbandingan IPM Kebumen dengan Jawa Tengah dan Indonesia.....	27
3.2. Perbandingan IPM Kebumen dengan Kabupaten/Kota Sekitar.....	32
<b>BAB IV. KESIMPULAN .....</b>	<b>41</b>
<b>REFERENSI .....</b>	<b>45</b>



<https://kebumenkab.bps.go.id>

# Pengukuran Pembangunan Manusia



<https://kebumenkab.bps.go.id>

## BAB I

### PENGUKURAN PEMBANGUNAN MANUSIA

#### 1.1. Perkembangan Pengukuran Pembangunan

Todaro dan Smith (2003) pada era sebelum 1970, menyatakan bahwa paradigma pembangunan hanya dipandang sebagai fenomena ekonomi. Pada saat itu perhatian dunia tertuju pada aspek pendapatan, modal, pertumbuhan ekonomi, dan berbagai aspek lain terkait dengan ekonomi. Akan tetapi seiring dengan waktu berjalan terdapat suatu paradoks, yakni munculnya berbagai fenomena sosial yang justru bertolak belakang dengan fenomena ekonomi. Data empiris menunjukkan bahwa beberapa negara yang mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi ternyata juga mengalami beberapa persoalan sosial, seperti pengangguran, kemiskinan, dan masalah sosial lain. Hal ini menyadarkan berbagai pihak bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan penduduk wilayah tersebut.

Keberadaan paradoks sosial-ekonomi tersebut disebabkan oleh dua hal. Pertama, nilai pendapatan nasional yang bermanfaat untuk banyak tujuan tidak mengungkap penerima manfaatnya. Kedua, penilaian kinerja yang hanya berdasarkan pada pendapatan nasional sering menimbulkan penafsiran yang keliru. Hal ini disebabkan oleh adanya aspek penting lain yang tidak tergambar oleh indikator tersebut. Aspek-aspek lain tersebut diantaranya adalah akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, akses yang lebih besar terhadap pengetahuan, mata pencaharian yang lebih aman, pekerjaan yang lebih baik, keamanan dari tindak kejahatan dan kekerasan fisik, waktu senggang yang memuaskan, dan perasaan berperan aktif dalam kegiatan sosial, ekonomi, budaya, dan politik.

Konsep pembangunan yang cenderung kurang komprehensif dengan hanya berfokus pada aspek ekonomi melahirkan perspektif baru dalam pembangunan. Konsep pembangunan manusia yang baru bertujuan untuk memperbaiki kekurangan tersebut dengan melihat pembangunan secara lebih komprehensif. Konsep pembangunan manusia tidak hanya berdasarkan pada aspek pendapatan, tetapi juga berdasarkan aspek kesehatan dan pendidikan.

Konsep pembangunan manusia pertama kali dikemukakan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada 1990 melalui laporan yang berjudul *Human Development Report*. UNDP dalam laporan tersebut menyatakan bahwa manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya, sehingga pembangunan manusia harus menempatkan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan, bukan hanya sebagai input pembangunan. Oleh karena itu, dalam perspektif pembangunan manusia, tujuan pembangunan pada dasarnya adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk menikmati umur panjang, hidup sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (UNDP, 1990).

Gagasan pembangunan manusia yang dikemukakan oleh UNDP pada 1990 memberikan paradigma baru tentang bagaimana melihat pembangunan. Paradigma pembangunan manusia berbeda dengan pendekatan pembangunan konvensional seperti pertumbuhan ekonomi, pembentukan modal manusia, pengembangan sumber daya manusia, kesejahteraan masyarakat atau kebutuhan dasar manusia. Perbedaan cara pandang pendekatan tersebut antara lain sebagai berikut.

- Pertumbuhan ekonomi adalah hal yang diperlukan dalam pembangunan manusia. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup dalam meningkatkan kesejahteraan manusia. Kemajuan manusia dalam masyarakat mungkin saja masih rendah meskipun Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan per kapita tumbuh tinggi, dan sebaliknya.

- Teori pembentukan modal manusia dan pengembangan sumber daya manusia memandang manusia sebagai alat dan bukan sebagai tujuan. Kedua pendekatan tersebut berfokus pada sisi penawaran yang memandang manusia sebagai sumber daya untuk menghasilkan produksi. Akan tetapi, manusia sebenarnya memiliki nilai yang lebih dari sekadar barang modal kegiatan produksi. Manusia juga merupakan tujuan akhir dan penerima manfaat dari proses ini.
- Pendekatan kesejahteraan masyarakat lebih memandang manusia sebagai penerima manfaat dari proses pembangunan daripada sebagai agen di dalamnya. Pendekatan ini lebih menekankan kebijakan distribusi daripada struktur produksi.
- Pendekatan kebutuhan dasar berfokus pada kelompok barang dan jasa yang dibutuhkan oleh suatu kelompok masyarakat, seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, perawatan kesehatan, dan air. Pendekatan ini berfokus pada penyediaan barang dan jasa dibandingkan masalah pilihan manusia.

## **1.2. Pembangunan Manusia sebagai Perluasan Pilihan**

Gagasan tentang pembangunan manusia merupakan manifestasi dari konsep kapabilitas yang dikemukakan oleh Amartya Sen. Menurut Sen (2003), kapabilitas merupakan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang dianggap bernilai. Hal yang mendasar bagi hidup manusia pada dasarnya adalah kemampuan. Sen menyebut konsep ini dalam banyak terminologi, yaitu kesempatan, daya, dan juga sebagai kebebasan. Kapabilitas seseorang merupakan kombinasi dari berbagai kesempatan yang bisa diperoleh manusia untuk menjalankan fungsi dalam hidupnya. Dengan kata lain, kapabilitas adalah sebuah bentuk kebebasan untuk mencapai berbagai pilihan dalam menjalankan fungsi hidup.

Untuk memahami konsep kapabilitas, Sen memberikan contoh analisisnya pada kasus orang yang berpuasa dan orang kelaparan. Seseorang yang berpuasa misalnya, orang tersebut menjalani situasi yang hampir sama untuk hidup seperti mereka yang miskin dan terpaksa lapar, dalam hal jumlah makanan atau gizi yang mereka konsumsi. Akan tetapi mereka memiliki 'perangkat kapabilitas' (*capability set*) lebih besar dibanding mereka yang miskin karena kelompok pertama dapat memilih makan lebih enak sedangkan yang kedua tidak. Terdapat perbedaan yang jelas diantara mereka, yakni yang berpuasa mengalami lapar karena pilihan atau kehendaknya sendiri sedangkan yang benar-benar menderita kelaparan tidak memiliki pilihan.

Sen membagi konsep kapabilitas menjadi dua, yaitu *well-being freedom* dan *agency freedom*. *Well-being freedom* merupakan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang sangat menentukan kesejahteraan seseorang. Sementara *agency freedom* adalah kemampuan seseorang melakukan atau mencapai sesuatu yang dianggap bernilai.

Dalam konteks pembangunan, Sen melihat kapabilitas sebagai elemen paling mendasar dalam hidup manusia karena terkait dengan kemampuan meraih kehidupan yang dianggap bernilai. Pendekatan kapabilitas fokus pada persoalan bagaimana individu memiliki kemampuan melakukan sesuatu. Pendekatan ini juga fokus pada kemampuan manusia memilih melakukan hal-hal penting untuk meningkatkan kesejahterannya, bukan hanya pada persoalan seberapa banyak harta kekayaan atau pendapatan yang dimiliki. Dengan demikian, kapabilitas mengacu pada kemungkinan individu untuk merealisasikan dirinya, yaitu memilih yang penting untuk kesejahterannya. Kapabilitas juga mengacu pada hal-hal yang harus dibangun, bukan hanya dimensi kesejahteraan, tetapi juga kebebasan sipil dan politik, seperti kebebasan berpartisipasi dalam politik, kebebasan berpendapat, dan lain-lain.

Dengan konsep kapabilitas, Sen berpendapat bahwa ada tiga aspek yang terkait dengan pembangunan, yaitu sebagai berikut.

1. Keberfungsian (*functionings*) adalah suatu keadaan *doing and being* seperti dipelihara dengan baik, terlindungi, cukup makan, dan bebas dari malaria. Hal tersebut harus dapat dibedakan dengan komoditas yang digunakan untuk mencapainya.
2. Kemampuan (*capabilities*) mengacu pada serangkaian fungsi berharga yang dimiliki seseorang. Kemampuan seseorang mewakili kebebasan individu untuk memilih antara kombinasi fungsi berbeda yang dimilikinya untuk alasan yang dianggap bernilai.
3. Sumber daya (*resources*) yang merupakan input dan nilainya tergantung pada kemampuan untuk mengubah sumber daya menjadi fungsi yang berharga.

Sen menggunakan contoh seseorang yang bersepeda untuk menggambarkan aspek terkait pembangunan. Agar dapat bersepeda (*functioning*), seseorang harus memiliki sepeda (*resource*). Namun, orang tersebut juga harus memiliki kemampuan untuk mengubah sepeda menjadi sesuatu yang berfungsi. Bersepeda terkait dengan kemampuan seseorang dalam hal fisiologi dan kesejahteraan pribadi (seperti kesehatan), norma sosial, dan lingkungan fisik (seperti kualitas jalan). Dengan konsep tersebut, Sen mendefinisikan pembangunan manusia sebagai perluasan kebebasan yang dinikmati oleh manusia. Kebebasan terkait dengan berbagai faktor sosial ekonomi seperti akses pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan politik.

Selain Sen, Mahbub ul Haq juga menjadi tokoh penting yang berperan dalam memformulasikan paradigma pembangunan manusia. Haq (1995) melihat semakin banyak bukti yang tidak mendukung keyakinan awal tentang kekuatan *trickle down* kekuatan pasar untuk memberikan manfaat ekonomi yang merata dan menghapuskan kemiskinan. Mahbub ul Haq mengartikan



pembangunan manusia dengan konsep pilihan manusia (*people choices*). Mahbub ul Haq berpendapat bahwa pembangunan manusia merupakan proses perluasan pilihan yaitu kebebasan berpolitik, partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, pilihan untuk berpendidikan, bertahan hidup dan sehat, menikmati standar hidup layak, serta berpartisipasi dalam kehidupan komunitas serta dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia dilihat sebagai ruang pilihan-pilihan, sebagaimana manusia memiliki berbagai potensi dalam dirinya untuk menentukan pilihan. Konsep kapabilitas yang dikemukakan oleh Sen dan konsep pilihan manusia yang dikemukakan oleh Haq menjadi dasar dalam paradigma pembangunan manusia yang diimplementasikan oleh UNDP. Berdasarkan konsep tersebut, UNDP mendefinisikan pembangunan manusia sebagai proses perluasan pilihan manusia (*enlarging the people choices*).

### **1.3. Perkembangan Pengukuran Pembangunan Manusia**

UNDP menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pada kali pertama IPM dirilis, ketiga dimensi tersebut diwakili dengan tiga indikator dalam penghitungan, yaitu Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), Angka Melek Huruf (AMH), dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Metode agregasi yang dilakukan untuk menghitung IPM menggunakan rata-rata aritmetik.

Untuk memenuhi tuntutan perkembangan, UNDP melakukan penyempurnaan terhadap penghitungan IPM. UNDP tercatat telah lima kali melakukan penyempurnaan sejak kali pertama dirilis. Tahun 2010, UNDP melakukan perubahan yang cukup signifikan terhadap penghitungan IPM dengan tetap mempertahankan tiga dimensi yang sama tetapi mengubah indikator yang digunakan. Agregasi Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) diubah menjadi agregasi Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Sementara itu, PDB per kapita diubah menjadi angka Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Selain perubahan pada indikator, UNDP juga mengubah penghitungan agregasi IPM dari rata-rata aritmetik menjadi rata-rata geometrik.



Gambar 1.1. Perkembangan Metodologi IPM

Perubahan metodologi penghitungan IPM didasarkan pada alasan bahwa suatu indeks komposit harus mampu mengukur apa yang diukur. Dengan pemilihan metode dan variabel yang tepat, indeks yang dihasilkan akan relevan. Selain itu, terdapat dua hal mendasar yang menjadi alasan utama perubahan metodologi penghitungan IPM. Pertama, beberapa indikator sudah tidak tepat lagi digunakan dalam penghitungan IPM. Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan lagi menjadi indikator perkembangan pendidikan karena kurang menggambarkan kualitas pendidikan.

Sebelum revisi penghitungan pada tahun 2010, AMH di sebagian besar negara sudah tinggi sehingga tidak mampu membedakan tingkat pendidikan antarnegara dengan baik. Dalam konsep pembentukan indeks komposit, indikator yang tidak sensitif dalam membedakan akan menyebabkan indeks komposit menjadi tidak relevan. Dengan pertimbangan tersebut, indikator AMH perlu diganti dengan indikator lain yang representatif. Penggunaan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah dapat memberikan gambaran yang lebih relevan tentang dimensi pendidikan dan perubahannya.

Indikator berikutnya yang diganti adalah PDB per kapita. Indikator ini pada dasarnya merupakan pendekatan terhadap pendapatan masyarakat. Namun, konsep mendasar dalam penghitungan adalah PDB diciptakan dari seluruh faktor produksi yang menyertakan tenaga kerja dan investasi dari dalam dan luar negeri. Oleh karena itu, PDB per kapita kurang dapat menggambarkan pendapatan masyarakat. Penggunaan PNB yang menggantikan PDB dapat lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah, karena hanya memperhitungkan faktor produksi yang menyertakan tenaga kerja dan investasi dari dalam negeri.

Kedua, penggunaan rata-rata aritmetik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah pada suatu dimensi tertutupi oleh capaian yang tinggi dari dimensi lain. Sementara itu, konsep mendasar dalam pembangunan manusia adalah pemerataan dimensi dan menghindari ketimpangan antardimensi. Penggunaan rata-rata aritmetik memungkinkan adanya transfer penilaian dalam capaian dari dimensi dengan capaian tinggi ke dimensi dengan capaian rendah, sehingga perlu diganti dengan rata-rata geometrik. Penggunaan rata-rata geometrik tidak serta merta dapat menutupi kekurangan pada suatu dimensi dengan dimensi lain yang unggul. Dengan kata lain, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang merata diperlukan keseimbangan antardimensi yang sama pentingnya.

Sejalan dengan konsep pembangunan manusia yang dipromosikan oleh UNDP, Kebumen mulai melakukan penghitungan IPM pada tahun 1996. Saat itu IPM dihitung secara berkala setiap tiga tahun di tingkat nasional dan provinsi. Pada tahun 1999, Kebumen menghitung IPM sampai dengan tingkat kabupaten/kota dan dilakukan untuk periode data 1996 dan 1999, kemudian dilanjutkan lagi pada tahun 2002 untuk data 2002. Sejak tahun 2004, IPM dihitung secara berkala setiap tahun sampai dengan level kabupaten/kota untuk memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan, terutama dalam penentuan besaran Dana Alokasi Umum (DAU). Sejak tahun data 2014, Kebumen

mengaplikasikan metode penghitungan IPM yang diperbarui UNDP pada tahun 2010 dan untuk memenuhi ketersediaan data tahun sebelumnya dilakukan *backasting* untuk periode data 2010 – 2013.

#### **1.4. Dimensi dan Indikator Pembangunan Manusia**

Sejak kali pertama merilis IPM pada tahun 1990, UNDP menggunakan tiga dimensi pembentuk IPM. Ketiga dimensi ini merupakan pendekatan yang dipilih dalam penggambaran kualitas hidup manusia dan tidak mengalami perubahan hingga saat ini. Dimensi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*).
2. Pengetahuan (*knowledge*).
3. Standar hidup layak (*decent standard of living*).

Penghitungan IPM yang dilakukan di Kebumen mengacu pada ketiga dimensi tersebut. Ketika UNDP melakukan perubahan dan penyempurnaan metode penghitungan IPM, Kebumen juga turut mengadopsi metode tersebut dengan mengacu pada penyempurnaan yang dilakukan oleh UNDP. Penghitungan yang dilakukan sejak 2015 hingga saat ini mengadopsi metodologi yang direvisi UNDP pada 2014.

UNDP menggunakan data Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita sebagai indikator pada dimensi standar hidup layak. Akan tetapi, data tersebut tidak tersedia di tingkat daerah sehingga digunakan indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan sebagai alternatif. Indikator ini dapat dihitung hingga tingkat kabupaten/kota. Indikator pengeluaran riil per kapita juga mampu mencerminkan indikator pendapatan masyarakat dan menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai output dari kegiatan ekonomi.

Dimensi umur panjang dan hidup sehat direpresentasikan oleh indikator umur harapan hidup saat lahir. Penggunaan umur harapan hidup sebagai indikator didasari oleh kepercayaan umum bahwa umur panjang merupakan hal

yang berharga dan kenyataan bahwa terdapat berbagai faktor yang berkaitan erat dengan umur harapan hidup, seperti nutrisi yang cukup dan kesehatan yang baik.

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) merupakan rata-rata perkiraan lamanya waktu (dalam tahun) yang dapat dijalani oleh seseorang selama hidupnya. Penghitungan UHH dilakukan melalui pendekatan tidak langsung (*indirect estimation*). Standardisasi nilai UHH dilakukan dengan konversi menjadi indeks harapan hidup yang dihitung berdasarkan nilai maksimum dan minimum UHH yang sesuai dengan standar UNDP, yaitu 85 tahun untuk nilai maksimum dan 20 tahun untuk nilai minimum.

Dimensi pengetahuan direpresentasikan oleh Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Kedua indikator tersebut merefleksikan kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan, khususnya pendidikan formal. HLS menggambarkan kesempatan yang dimiliki masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan formal, sedangkan RLS menggambarkan stok modal manusia yang dimiliki oleh suatu wilayah.

Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak yang berumur 7 tahun, sementara rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun yang dijalani oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menempuh pendidikan formal. Penghitungan indeks pendidikan didasarkan pada rata-rata indeks HLS dan indeks RLS dengan bobot yang sama. Adapun dalam penghitungan indeks HLS dan RLS digunakan batasan nilai maksimum dan minimum yang sama dengan standar UNDP. Nilai maksimum dan minimum untuk HLS masing-masing 18 tahun dan 0 tahun, sementara nilai maksimum dan minimum untuk RLS masing-masing 15 tahun dan 0 tahun. Sumber data yang digunakan untuk menghitung indikator HLS dan RLS adalah hasil Susenas bulan Maret serta data jumlah siswa yang menjalani pendidikan dengan bermukim dari Kementerian Agama dan hasil inventarisasi data sektoral di daerah.

#### **1.4. Manfaat Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu indikator yang penting untuk melihat pembangunan dari sisi manusia. Setiap indikator komponen penghitungan IPM dapat dimanfaatkan untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia. Secara kontekstual, perkembangan IPM menunjukkan perubahan pilihan-pilihan masyarakat untuk menjalani kehidupan yang bernilai.

Dalam konteks pengambilan kebijakan, IPM merupakan salah satu indikator target pembangunan dalam pembahasan asumsi makro pemerintah dan DPR. IPM bersama dengan indikator pertumbuhan ekonomi, PDB per kapita, pertumbuhan investasi, kemiskinan, rasio gini, inflasi, dan pengangguran juga menjadi indikator penting dalam Kerangka Ekonomi Makro (KEM). Pemerintah terus mengevaluasi kemajuan KEM untuk memastikan arah pembangunan berjalan sesuai koridor yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Sementara itu, dalam konteks penganggaran pembangunan, IPM digunakan sebagai salah satu variabel dalam penentuan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU). Selain IPM, variabel lain yang digunakan dalam penentuan DAU adalah jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. DAU merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dalam mendanai pembangunan daerah.

Selain sebagai salah satu variabel penentuan DAU, komponen IPM (HLS, RLS, dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan) merupakan indikator yang digunakan dalam penghitungan Dana Insentif Daerah (DID). DID merupakan salah satu instrument pemerintah dalam meningkatkan kinerja pemerintah

daerah. DID adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

<https://kebumenkab.bps.go.id>



<https://kebumenkab.bps.go.id>

Capaian  
Pembangunan Manusia



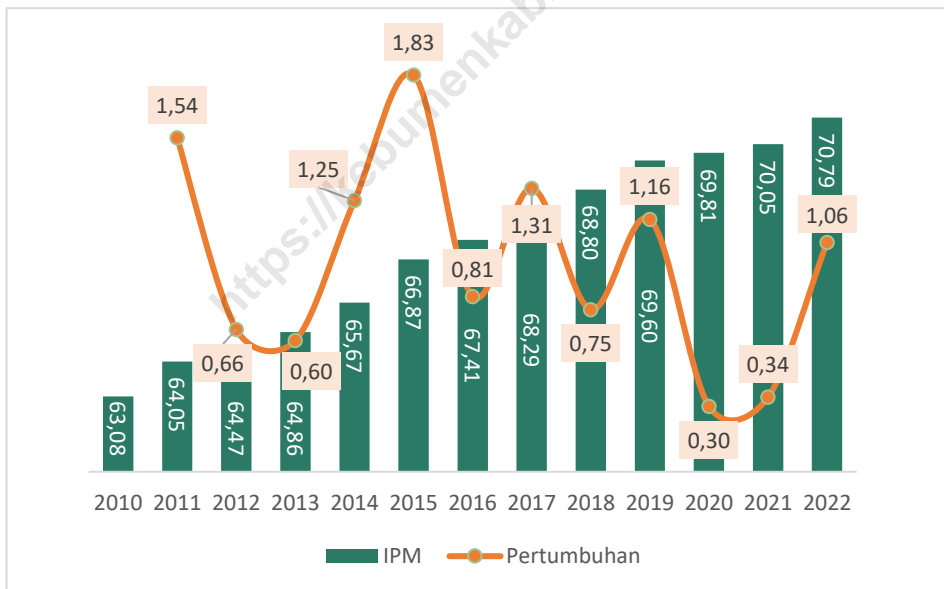
<https://kebumenkab.bps.go.id>

## BAB II.

### CAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA

#### 2.1. Pandemi dan Pembangunan Manusia

Dari tahun ke tahun, IPM Kebumen selalu meningkat, bahkan sebelum pandemi COVID-19 pertumbuhannya selalu di atas 0,60 persen. Pada masa pandemi COVID-19, IPM Kebumen masih meningkat dari 69,60 pada 2019 menjadi 69,81 pada 2020, kemudian kembali meningkat menjadi 70,05 pada 2021 (Gambar 2.1). Berbagai upaya pemulihan sosial-ekonomi pasca pandemi, khususnya di Kabupaten Kebumen mulai membuahkan hasil. Hal ini tercermin dari peningkatan IPM yang cukup signifikan menjadi 70,79 pada tahun 2022.

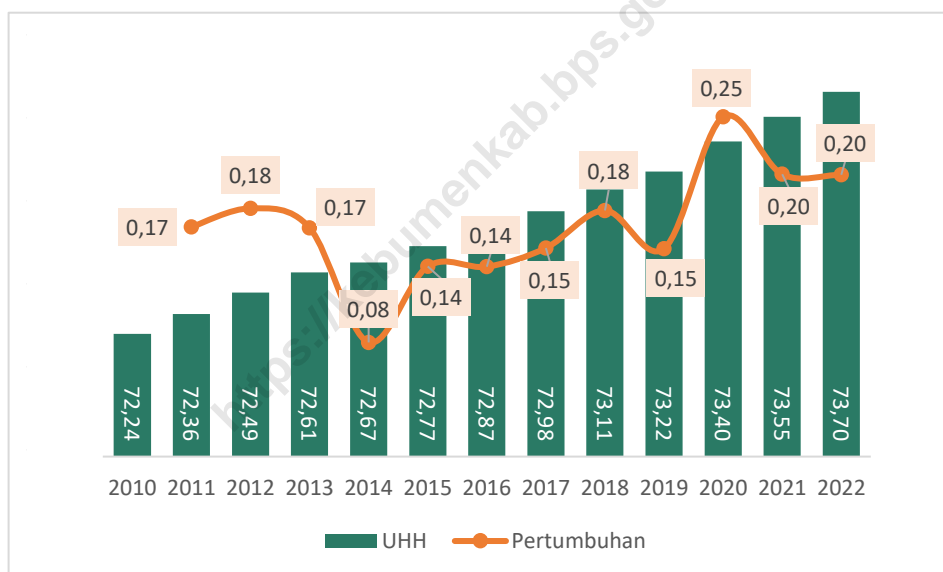


Gambar 2.1. Capaian dan Pertumbuhan IPM Kabupaten Kebumen, 2010 – 2022

Pada 2020, IPM Kebumen hanya tumbuh sebesar 0,30 persen (Gambar 2.1), seiring dengan penyebaran COVID-19 yang semakin luas dan kemudian diikuti dengan pembatasan kegiatan di berbagai bidang. Kondisi yang relatif sama juga terjadi pada 2021, IPM Kebumen meningkat 0,34 persen. Memasuki

tahun 2022, seluruh dunia mulai beradaptasi dengan kondisi pandemi yang ada. Dimulai dengan penggalakan vaksinasi serta berbagai pengenalan kebiasaan baru yang terdiri dari pengetatan protokol kesehatan hingga penerapan *work from home* untuk penduduk bekerja dan *school from home* untuk penduduk yang masih berada di bangku sekolah. Seiring dengan penyebaran COVID-19 yang semakin terkendali dan kegiatan ekonomi yang mulai pulih, IPM Kebumen mengalami perbaikan dan tumbuh lebih cepat pada 2022, yaitu sebesar 1,06 persen (Gambar 2.1).

### 2.1. Capaian Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

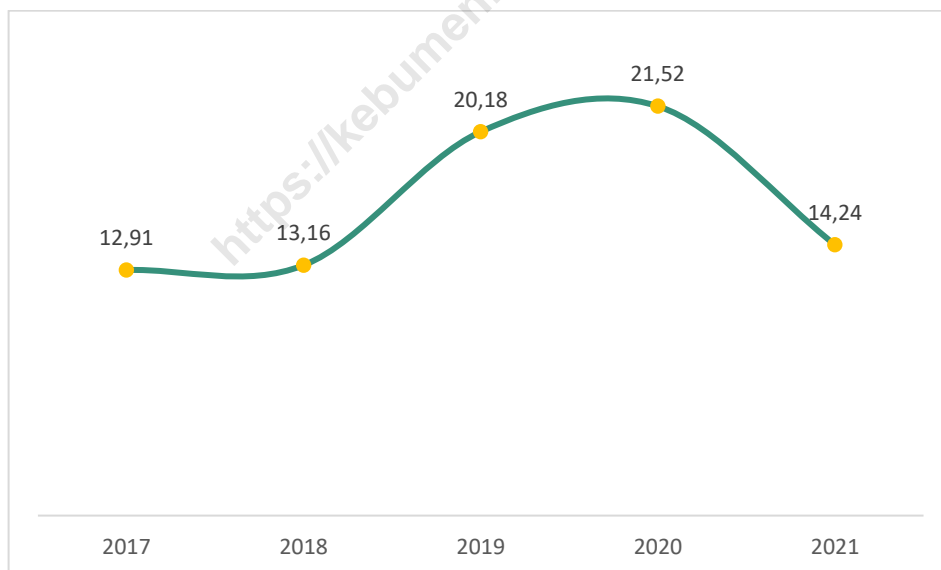


Gambar 2.2. Capaian dan Pertumbuhan UHH Kabupaten Kebumen, 2010 – 2022

Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan harapan hidup saat lahir. Harapan hidup saat lahir menunjukkan derajat kesehatan suatu negara. Semakin tinggi harapan hidup saat lahir suatu negara, semakin tinggi pula derajat kesehatan suatu negara (Jen et al, 2010). Capaian dimensi umur panjang dan hidup sehat tahun 2022 meningkat jika dibandingkan dengan 2021. Harapan hidup saat lahir Kebumen tahun 2022 adalah 73,70 tahun. Hal ini

berarti anak yang baru lahir pada tahun 2022 diharapkan dapat hidup hingga mendekati 74 tahun. Namun capaian dimensi umur panjang dan hidup sehat pada 2021 dan 2022 mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada periode tersebut, pertumbuhan harapan hidup saat lahir hanya sebesar 0,20 persen, sedangkan pada tahun 2020 pertumbuhannya mencapai 0,25 persen.

Perlambatan capaian dimensi umur panjang dan hidup sehat ini tidak lepas dari pandemi COVID-19. Pandemi mempengaruhi seluruh capaian dimensi pada pembangunan manusia. Memasuki tahun ketiga pandemi, harapan hidup saat lahir masih belum pulih dari tekanan pandemi. Hal ini terlihat dari capaiannya yang terus meningkat tapi pertumbuhannya melambat. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, baik dari faktor internal sektor kesehatan maupun faktor eksternal.



*Gambar 2.3. Morbiditas Kabupaten Kebumen, 2017 – 2021*

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Blum (1974), bahwa derajat kesehatan penduduk suatu negara dapat diukur dari angka kematian (mortalitas) dan angka kesakitan (morbidity). Angka morbidity di Kebumen sebelum pandemi terus menunjukkan tren peningkatan, yakni dari 12,91 pada

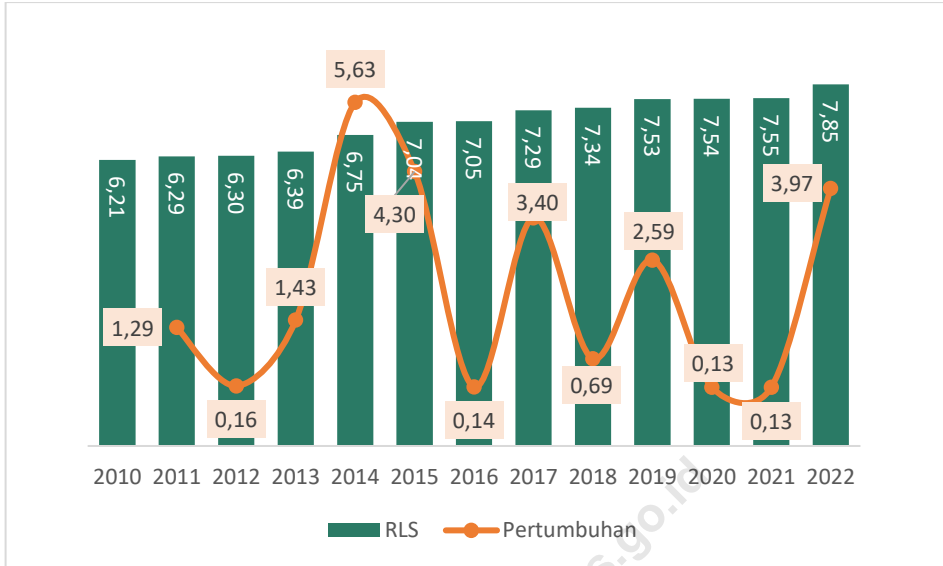
2017 menjadi 20,18 pada 2019 (Gambar 2.3). Pada awal pandemi, morbiditas Kebumen semakin meningkat menjadi 21,52. Akan tetapi pada tahun kedua pandemi, upaya pemulihan mulai berhasil yang terlihat pada penurunan morbiditas menjadi 14,24 pada 2021.

Jaba et al. (2014) menyebutkan bahwa derajat kesehatan suatu populasi merupakan dampak dari sistem kesehatan serta sumber daya yang ada di wilayah tersebut. Sumber daya dalam sistem kesehatan yang memiliki peran penting dalam derajat kesehatan suatu populasi adalah jumlah dokter, lama rawat inap, tingkat imunisasi, level edukasi, dan teknologi (Mohan et al., 2007). Selain itu, pengeluaran per kapita sebulan untuk kesehatan juga erat kaitannya dengan derajat kesehatan penduduk (Jaba et al., 2014).

### **2.1. Capaian Dimensi Pengetahuan**

Dimensi pengetahuan dalam pembentukan indeks pembangunan manusia disusun dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah yang dicakup adalah rata-rata lamanya waktu yang digunakan oleh penduduk berumur 25 tahun ke atas untuk menjalani pendidikan formal, sedangkan harapan lama sekolah adalah jumlah tahun yang diharapkan akan dijalani individu berusia 7 tahun untuk menempuh pendidikan.

Secara umum, kedua indikator ini memiliki tren meningkat dalam empat tahun terakhir. Rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas pada tahun 2022 di Kebumen yaitu 7,85 tahun. Angka ini dapat diinterpretasikan bahwa secara rata-rata, penduduk berusia 25 tahun ke atas telah menyelesaikan pendidikan hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas VIII. Capaian ini meningkat jika dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 7,55 tahun (Gambar 2.4).

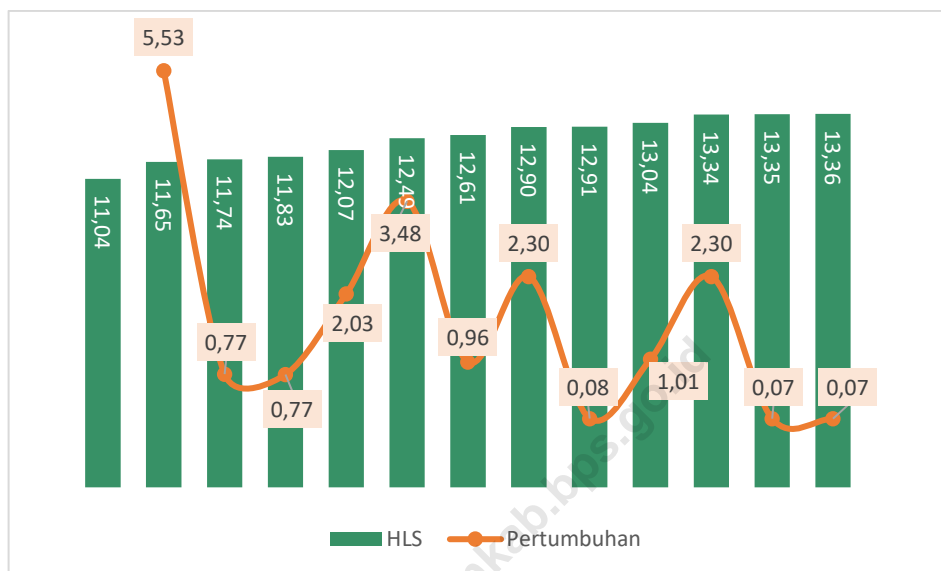


Gambar 2.4. Capaian dan Pertumbuhan RLS Kabupaten Kebumen, 2010 – 2022

Harapan lama sekolah Kebumen pada tahun 2022 yaitu 13,36 tahun. Hal ini berarti penduduk usia 7 tahun ke atas diharapkan dapat menyelesaikan pendidikan hingga level perguruan tinggi tahun pertama dengan kondisi aksesibilitas pendidikan yang stagnan atau tidak ada perubahan yang berarti. Harapan lama sekolah tahun 2022 meningkat 0,01 tahun dari tahun 2020 (Gambar 2.5).

Kedua indikator ini tak terlepas dari pengaruh pandemi. Meskipun kedua indikator dalam dimensi pengetahuan mengalami peningkatan, indikator rata-rata lama sekolah melambat pada dua tahun pertama pandemi (2020 dan 2021). Indikator rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebelum pandemi melanda, terlihat dari pertumbuhan capaian ini sebesar 2,59 persen pada tahun 2019. Namun pandemi berdampak pada melambatnya pertumbuhan rata-rata lama sekolah sebesar 0,13 persen pada tahun 2020 dan 2021. Berbagai upaya pemulihan sosial ekonomi mulai membuahkan hasil, termasuk pada sektor pendidikan. Hal ini tercermin dari

rata-rata lama sekolah yang tercatat tumbuh positif sebesar 3,97 persen pada tahun 2022.



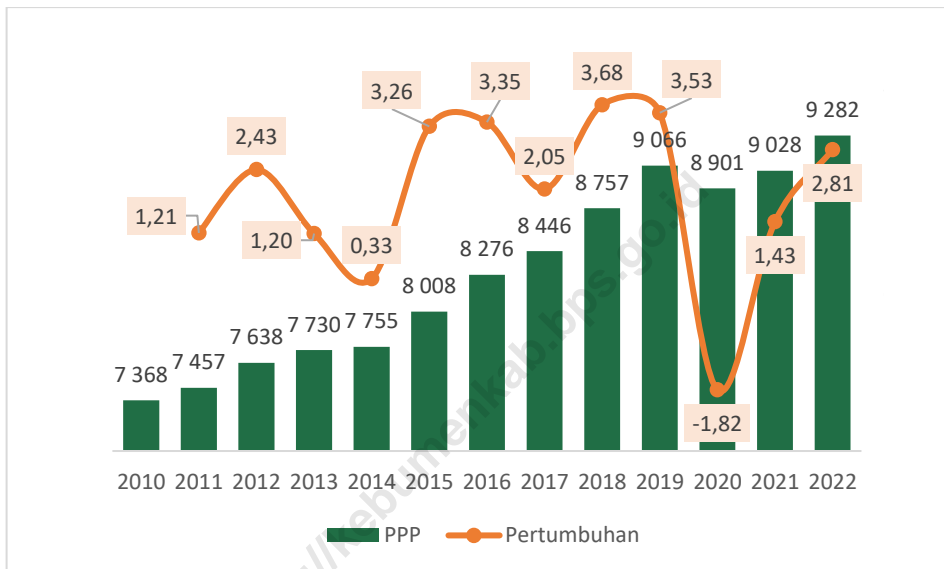
Gambar 2.5. Capaian dan Pertumbuhan HLS Kabupaten Kebumen, 2010 – 2022

Lain halnya dengan indikator rata-rata lama sekolah, indikator harapan lama sekolah justru relatif tidak berdampak pada awal pandemi. Harapan lama sekolah justru tumbuh positif sebesar 2,30 persen pada 2020. Dampak pandemi COVID-19 justru mulai dirasakan pada tahun kedua dan ketiga pandemi, yakni tahun 2021 dan 2022. Selama periode tersebut, harapan lama sekolah mengalami pertumbuhan tetapi melambat sebesar 0,07 persen.

### 2.1. Capaian Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi terakhir pembentuk IPM adalah dimensi standar hidup layak yang diwakili oleh indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Indikator ini menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat selama periode tertentu. Capaian indikator ini memiliki tren meningkat sebelum pandemi COVID-19 menyebar. Untuk kali pertama sejak metode baru penghitungan IPM diadopsi, pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan pada tahun 2020 turun

menjadi 8,9 juta rupiah per kapita per tahun. Pada tahun 2021 dan 2022, capaian indikator ini mulai mengalami pemulihan. Pada tahun 2021, pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan meningkat menjadi 9,03 juta rupiah per kapita per tahun, dan terus meningkat menjadi 9,28 juta rupiah per kapita per tahun pada 2022.



Gambar 2.6. Capaian dan Pertumbuhan PPP Kabupaten Kebumen, 2010 – 2022

Pertumbuhan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan pada tahun 2022 yaitu sebesar 2,81 persen. Pencapaian ini belum setinggi capaian pertumbuhan sebelum pandemi COVID-19, seiring dengan perekonomian Kebumen yang belum sepenuhnya pulih seperti sebelum pandemi (Gambar 2.11). Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan yang mulai memulih juga didukung oleh beberapa indikator seperti persentase penduduk miskin, gini rasio, rata-rata upah buruh/karyawan/pegawai per bulan, tingkat pengangguran terbuka, persentase pekerja formal, pertumbuhan PKRT, dan inflasi.



<https://kebumenkab.bps.go.id>

# Perbandingan IPM Kebumen



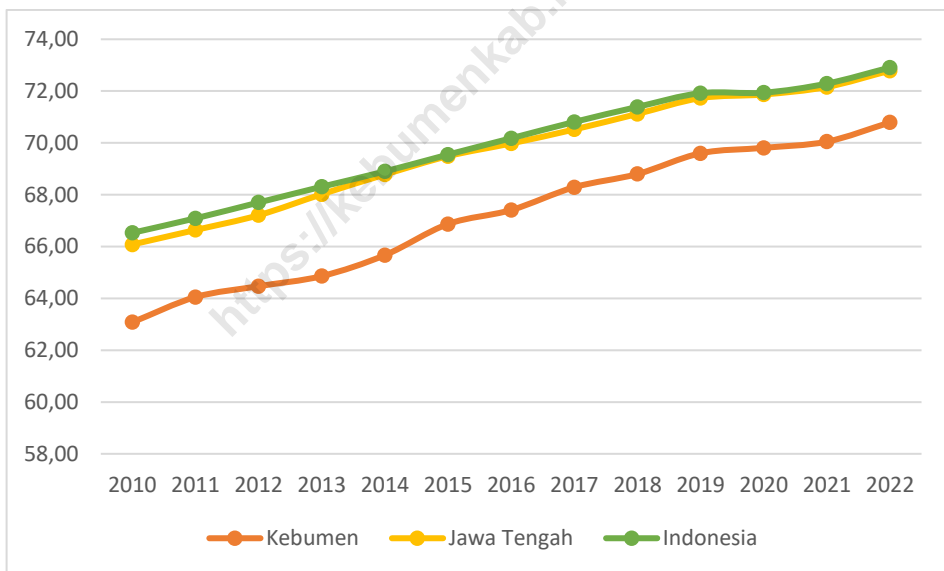
<https://kebumenkab.bps.go.id>

### BAB III.

#### PERBANDINGAN IPM KEBUMEN

##### 3.1. Perbandingan IPM Kebumen dengan Jawa Tengah dan Indonesia

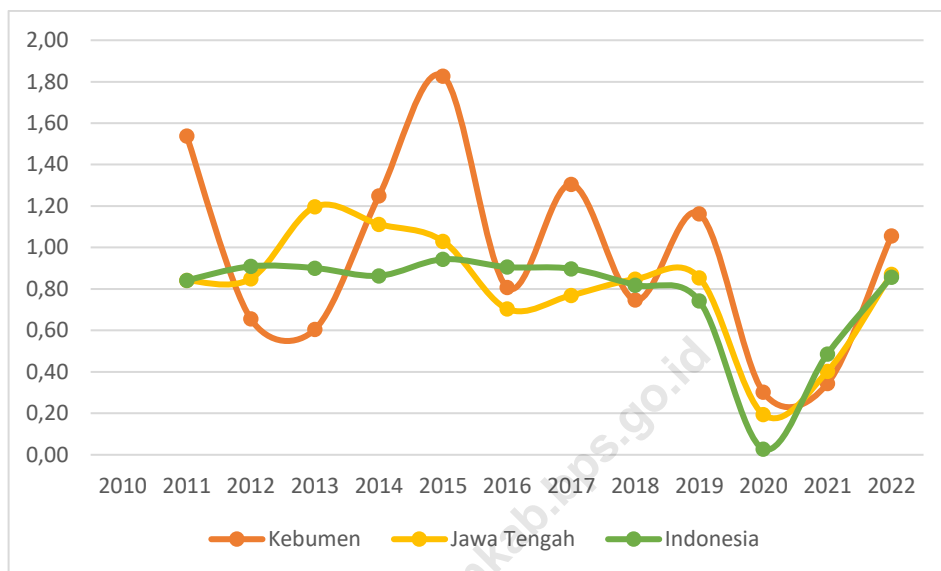
Keberagaman potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia antardaerah menyebabkan capaian pembangunan manusia berbeda pada setiap wilayah. Keberhasilan program-program pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah juga menentukan tinggi rendahnya capaian pembangunan manusia dalam suatu wilayah. Selain itu, diperlukan juga upaya pengawasan dan evaluasi terhadap program-program pembangunan untuk mempercepat peningkatan pembangunan manusia.



Gambar 3.1. IPM Kebumen, Jawa Tengah, dan Indonesia, 2010 – 2022

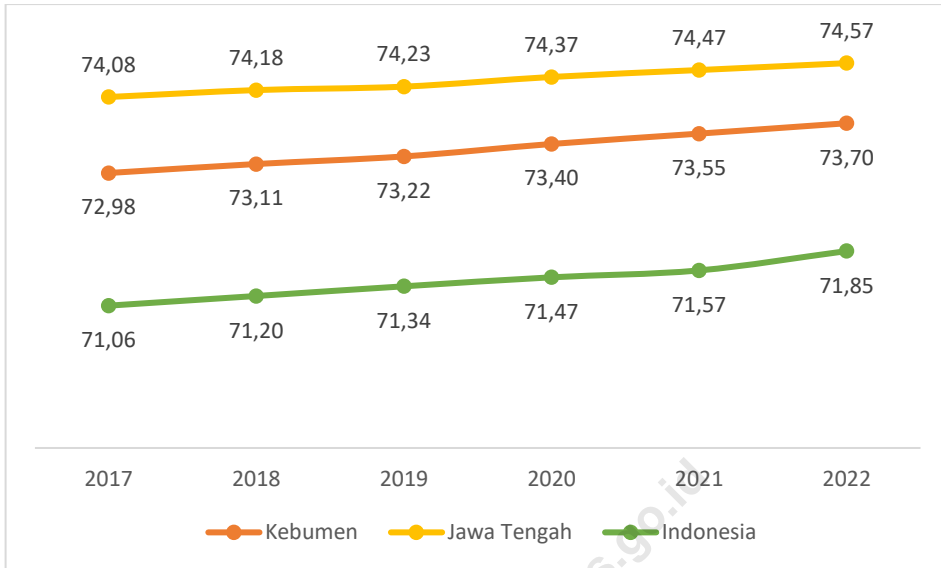
Selama 2010 – 2022, IPM Kebumen terus meningkat dari 63,08 menjadi 70,79, meskipun masih dibawah IPM Jawa Tengah dan Indonesia. Hal yang menarik, berdasarkan Gambar 3.1, adalah IPM Kebumen menunjukkan tren yang positif. Hal ini terlihat dari semakin menyempitnya jarak antara capaian IPM Kebumen dengan Jawa Tengah dan Indonesia. Potret ini menunjukkan

bahwa kebijakan-kebijakan pembangunan di Kebumen telah berada pada jalur yang tepat, khususnya dalam pembangunan manusia.



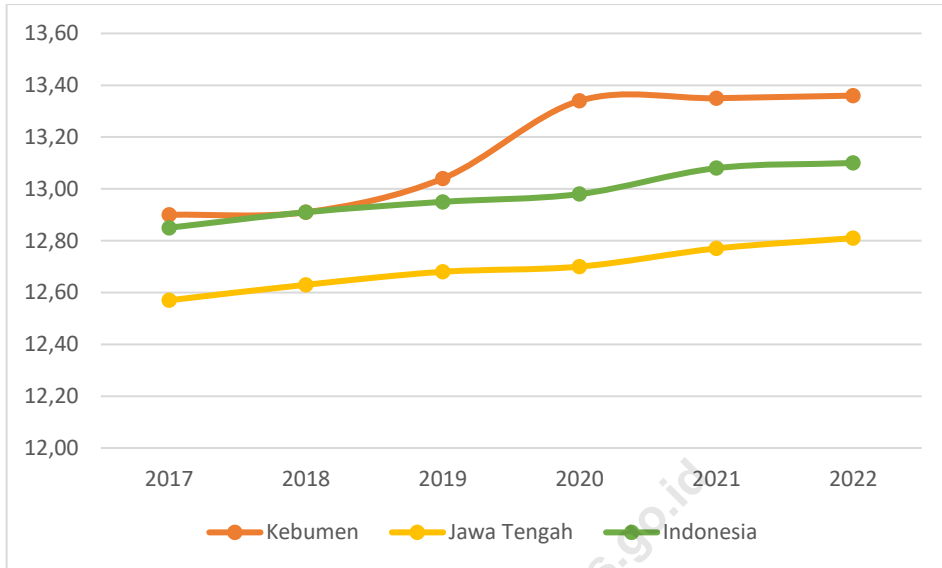
Gambar 3.2. Pertumbuhan IPM Kebumen, Jawa Tengah, dan Indonesia, 2010 – 2022

Secara umum selama 2010 – 2022, pertumbuhan IPM Kebumen rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Indonesia. Bahkan ketika awal pandemi tahun 2020, IPM Kebumen tetap mampu tumbuh lebih cepat, yakni 0,30 persen. Adapun Jawa Tengah dan Indonesia masing-masing hanya tumbuh sebesar 0,19 persen dan 0,03 persen. Dampak pandemi di Kebumen mulai dirasakan pada 2021. Hal ini terlihat dari IPM Kebumen yang tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Indonesia. Akan tetapi pada 2022, IPM Kebumen tumbuh jauh lebih cepat yakni 1,06 persen, sedangkan Jawa Tengah dan Indonesia masing-masing hanya tumbuh 0,87 persen dan 0,86 persen.



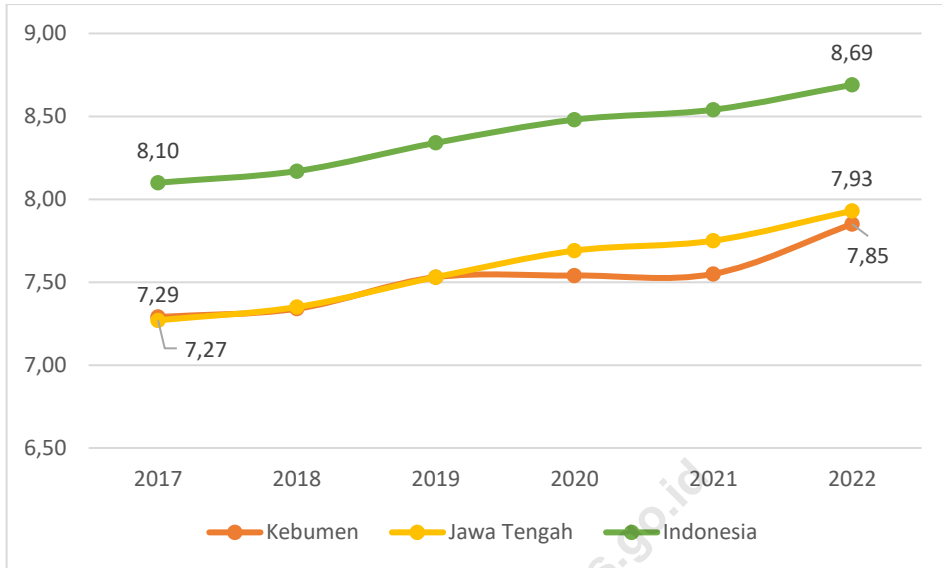
Gambar 3.3. UHH Kebumen, Jawa Tengah, dan Indonesia, 2010 – 2022

Berdasarkan dimensi umur panjang dan hidup sehat, UHH Kebumen selama 2017 – 2022 selalu meningkat. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan berbagai program pembangunan kesehatan di Kebumen. Grafik 3.3 juga menyajikan dua hal yang menarik. Pertama, UHH Kebumen selalu lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Sebaliknya pada periode yang sama, UHH Kebumen selalu lebih rendah daripada Jawa Tengah. Hal menarik kedua adalah capaian dimensi umur panjang dan hidup sehat Kebumen memiliki tren positif. Hal ini tercermin dari semakin mengecilnya jarak antara UHH Kebumen dengan Jawa Tengah, khususnya selama tiga tahun terakhir (2020 – 2022).



*Gambar 3.4. HLS Kebumen, Jawa Tengah, dan Indonesia, 2010 – 2022*

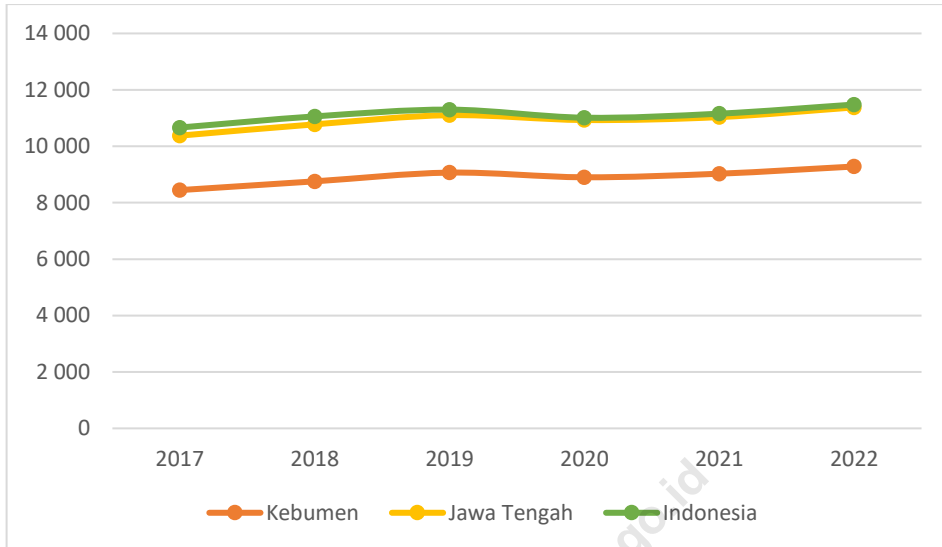
Pada dimensi pendidikan, capaian HLS selama 2017 – 2022 terus meningkat. Hal ini menggambarkan bahwa setiap anak yang lahir memiliki harapan yang lebih lama dalam bersekolah. Gambar 3.4 juga menunjukkan HLS Kebumen pada periode tersebut selalu lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Indonesia. Hal yang menarik adalah pada awal pandemi tahun 2020, HLS Kebumen justru mengalami peningkatan yang lebih signifikan dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Indonesia. Sebaliknya pada tahun kedua pandemi, tahun 2021, HLS Kebumen mengalami perlambatan, sedangkan HLS Jawa Tengah dan Indonesia tercatat tumbuh positif.



Gambar 3.5. RLS (tahun) Kebumen, Jawa Tengah, dan Indonesia, 2017 – 2022

Capaian rata-rata lama sekolah Kebumen dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Indonesia relatif belum optimal. Selama 2017 – 2022, RLS Kebumen selalu di bawah RLS Jawa Tengah dan Indonesia. Namun demikian, hal yang positif adalah RLS Kebumen semakin mendekati RLS Jawa Tengah, khususnya selama tiga tahun terakhir. Hal ini terlihat dari Gambar 3.5, jarak RLS Kebumen dan Jawa Tengah semakin mengecil. Pada 2022, RLS Kebumen tercatat sebesar 7,85 dan Jawa Tengah sebesar 7,93. Walaupun sempat melambat akibat pandemi pada 2020 dan 2021, RLS Kebumen pada 2022 mengalami pertumbuhan jauh lebih tinggi, yakni 3,97 persen, daripada Jawa Tengah dan Indonesia yang masing-masing hanya tumbuh sebesar 2,32 persen dan 1,76 persen.





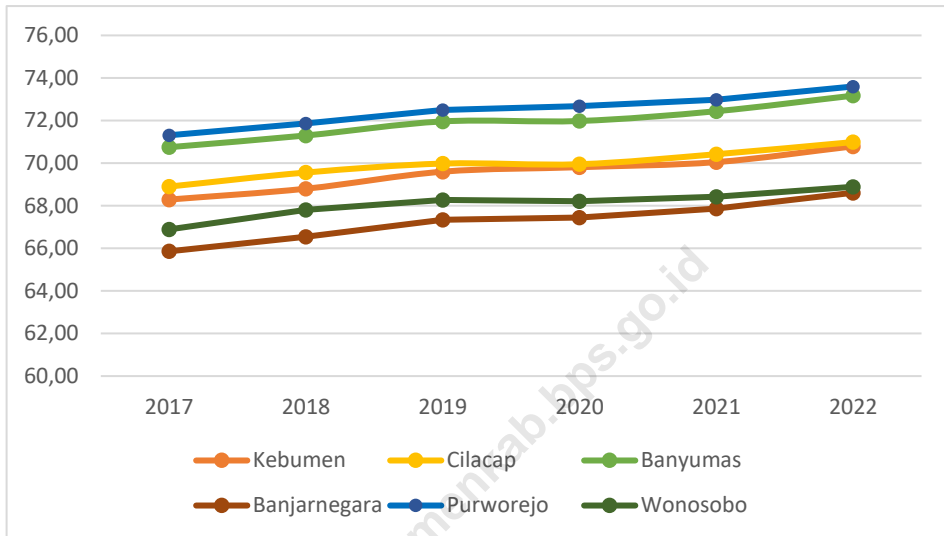
*Gambar 3.6. Pendapatan per Kapita yang Disesuaikan (Juta Rupiah/kapita/tahun) Kebumen, Jawa Tengah, dan Indonesia, 2017 – 2022*

Sama halnya dengan RLS, capaian pendapatan per kapita disesuaikan Kebumen juga selalu lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Indonesia. Adapun pendapatan per kapita disesuaikan Jawa Tengah dan Indonesia relatif sama. Pada 2022, pendapatan per kapita disesuaikan Kebumen tercatat sebesar 9,28 juta rupiah/kapita/tahun, Jawa Tengah sebesar 11,38 juta rupiah/kapita/tahun, dan Indonesia 11,48 juta rupiah/kapita/tahun. Hal ini menggambarkan bahwa standar hidup layak di Kebumen masih menjadi tantangan pembangunan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen harus berupaya memperbaiki capaian dimensi ini, diantaranya melalui berbagai program/kebijakan pengentasan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran terbuka.

### **3.2. Perbandingan IPM Kebumen dengan Kabupaten/Kota Sekitar**

Capaian IPM Kebumen dapat pula dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar, seperti Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Purworejo, dan Wonosobo. Perbandingan ini bukan hanya dari sisi capaian IPM, tetapi juga dari sisi dimensi penyusun IPM, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat,

pendidikan, serta standar hidup layak. Secara umum, capaian IPM dan dimensi penyusunnya relatif baik jika dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar. Namun, capaian ini masih menyisakan tantangan khususnya terkait dengan beberapa indikator dalam dimensi penyusun IPM.

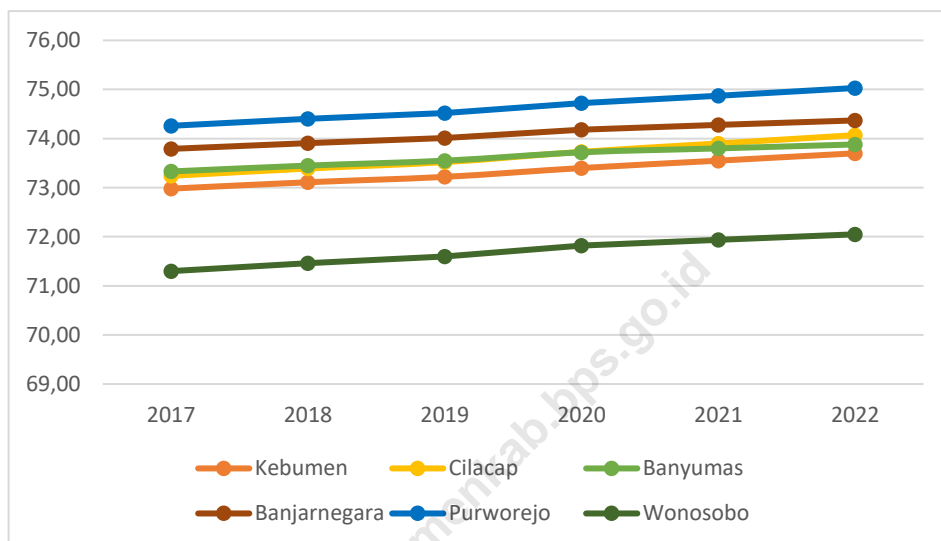


Gambar 3.7. IPM Kebumen dan Kabupaten/Kota Sekitar, 2017 – 2022

Pada 2017 – 2022, capaian IPM Kebumen selalu lebih tinggi dibandingkan dengan Wonosobo dan Banjarnegara, tetapi masih lebih rendah daripada Cilacap, Banyumas, dan Purworejo. Pada 2022 IPM Kebumen sebesar 70,79, sedangkan Wonosobo dan Banjarnegara masing-masing sebesar 68,89 dan 68,61. Adapun IPM Cilacap sebesar 70,99, Banyumas 73,17, dan Purworejo sebesar 73,60.

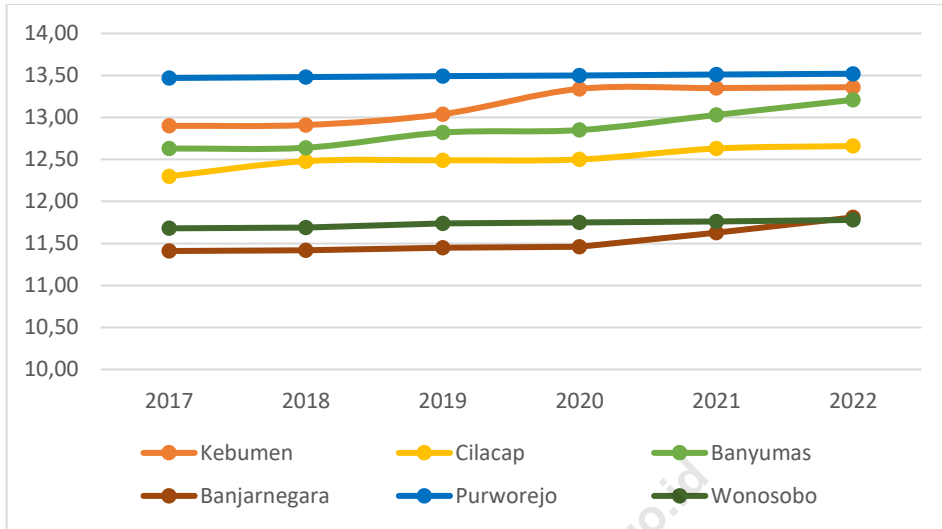
Hal yang positif adalah selama tiga tahun terakhir (2020 – 2022), IPM Kebumen semakin mendekati IPM Cilacap. Hal ini terlihat dari Gambar 3.7, yakni jarak antara IPM Kebumen dan Cilacap semakin mengecil. Hal positif lain adalah pada awal pandemi, walaupun capaian IPM tumbuh melambat, tetapi pertumbuhan IPM Kebumen tidak selambat kabupaten/kota sekitar. Pada 2020, IPM Kebumen tercatat tumbuh melambat 0,30 persen. Upaya pemulihan dampak pandemi di Kebumen pun relatif jauh membuahkan hasil dibandingkan

dengan kabupaten/kota sekitar. Hal ini tercermin pada tahun ketiga pandemi, yakni IPM Kebumen tercatat mengalami pertumbuhan positif tertinggi kedua setelah Banjarnegara, sebesar 1,06 persen.



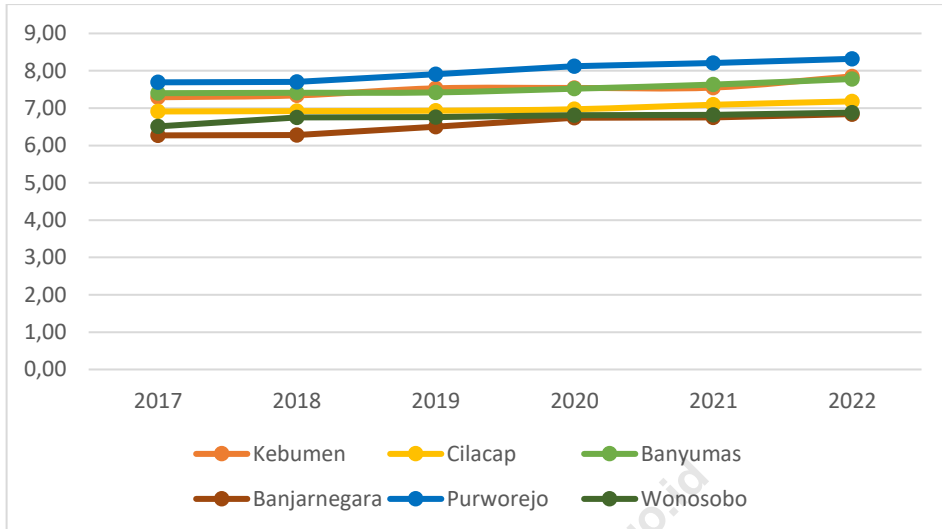
Gambar 3.8. UHH Kebumen dan Kabupaten/Kota Sekitar, 2017 – 2022

Pada 2017 – 2022, capaian dimensi umur panjang dan hidup sehat Kebumen relatif belum optimal. Hal ini terlihat pada Gambar 3.8, yaitu UHH Kebumen yang hanya lebih tinggi dibandingkan Wonosobo, tetapi masih lebih rendah daripada Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, dan Purworejo. Pada 2022 UHH Kebumen sebesar 73,70, sedangkan Wonosobo sebesar 72,05. Adapun IPM Cilacap sebesar 74,07, Banyumas 73,88, Banjarnegara 74,37, dan Purworejo sebesar 75.03. Hal yang positif pada dimensi ini adalah UHH Kebumen selama tiga tahun terakhir semakin mendekati UHH Banyumas dan Cilacap. Hal ini ditunjukkan dengan semakin mengecilnya jarak UHH Kebumen dengan kedua kabupaten tersebut.



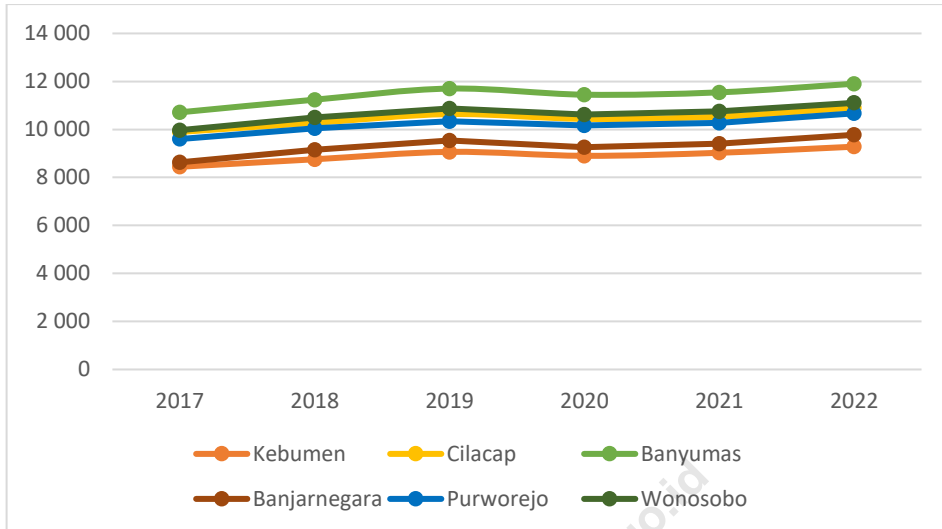
Gambar 3.9. HLS Kebumen dan Kabupaten/Kota Sekitar, 2017 – 2022

Capaian dimensi pendidikan Kebumen, dari sisi HLS, pada 2017 – 2022 relatif baik. Hal ini terlihat pada Gambar 3.9, yaitu HLS Kebumen selalu lebih tinggi dibandingkan Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, dan Wonosobo. Capaian ini selama periode tersebut hanya masih lebih rendah daripada Purworejo. Pada 2022 HLS Kebumen sebesar 13,36. Adapun capaian HLS Cilacap tercatat sebesar 12,66, Banyumas, 13,21, Banjarnegara 11,81, dan Wonosobo sebesar 11,78. Sementara itu, capaian HLS Purworejo selalu lebih tinggi yakni 13,52. Hal yang positif pada indikator ini adalah HLS Kebumen selama tiga tahun terakhir semakin mendekati HLS Purworejo. Hal ini ditunjukkan dengan semakin mengecilnya jarak HLS Kebumen dengan kabupaten tersebut.



*Gambar 3.10. RLS Kebumen dan Kabupaten/Kota Sekitar, 2017 – 2022*

Capaian dimensi pendidikan, terkait RLS tidak jauh berbeda dengan HLS. Pada 2017 – 2022, RLS Kebumen selalu lebih tinggi dibandingkan dengan Cilacap, Banyumas, dan Banjarnegara. Selama periode tersebut, RLS Kebumen hanya masih lebih rendah daripada Purworejo. Pada 2022, RLS Kebumen tercatat sebesar 7,85 tahun, sedangkan Purworejo sebesar 8,32 tahun. Hal ini berarti penduduk Kebumen berusia 25 tahun ke atas telah menyelesaikan pendidikan hingga SMP kelas VIII, sedangkan penduduk Purworejo rata-rata telah hampir menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun. Hal yang positif adalah RLS Kebumen selama dua tahun terakhir semakin mendekati RLS Purworejo. Hal ini terlihat pada Gambar 3.10, yakni jarak capaian RLS antara Kebumen dan Purworejo semakin mengecil. Hal positif ini sekaligus menunjukkan bahwa upaya-upaya pemulihan dampak pandemi di Kebumen, khususnya dalam bidang pendidikan, relatif berhasil.



Gambar 3.11. Pendapatan per Kapita yang Disesuaikan Kebumen dan Kabupaten/Kota Sekitar, 2017 – 2022

Diantara dimensi-dimensi pembentuk IPM lain, capaian dimensi standar hidup layak Kebumen relatif masih menjadi tantangan. Hal ini tercermin dari capaian pendapatan per kapita disesuaikan Kebumen pada 2017 – 2022 yang selalu lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar. Pada 2022, pendapatan per kapita disesuaikan Kebumen tercatat hanya sebesar 9,28 juta rupiah/kapita/tahun, sedangkan kabupaten/kota sekitar rata-rata telah mencapai 10 juta rupiah/kapita/tahun. Pandemi COVID-19 selama tiga tahun terakhir ini pun semakin menekan capaian dimensi ini. Pada 2022, pertumbuhan capaian Kebumen pada dimensi ini tercatat paling kecil, yakni hanya tumbuh positif 2,81 persen. Adapun capaian kabupaten/kota sekitar Kebumen pada dimensi ini tercatat tumbuh positif lebih dari tiga persen.

<https://kebumenkab.bps.go.id>

# Kesimpulan



<https://kebumenkab.bps.go.id>



<https://kebumenkab.bps.go.id>

## **BAB IV.**

### **KESIMPULAN**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kebumen tahun 2022 telah mencapai 70,79. Dengan capaian IPM itu, Kebumen berada pada posisi status pembangunan manusia kategori 'tinggi'. Capaian tersebut mengantarkan Kebumen pada posisi 26 dari 35 kabupaten/kota dalam pencapaian pembangunan manusia di Jawa Tengah. Meskipun capaian IPM Kebumen berada di bawah capaian Jawa Tengah dan Indonesia, namun pertumbuhan IPM Kebumen selama lebih dari satu dekade terakhir yang sebesar 0,97 persen per tahun berada di atas Jawa Tengah dan Indonesia yang masing-masing sebesar 0,81 persen dan 0,77 persen per tahun.

Capaian IPM Kebumen pada tahun 2022 merupakan agregasi dari capaian tiga dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diwakili oleh indikator Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) menunjukkan capaian yang bagus. Saat ini, rata-rata bayi yang baru lahir dapat bertahan hidup hingga usia 73,70 tahun atau hampir 74 tahun.

Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS Kebumen sebesar 7,85 tahun. Hal ini berarti secara rata-rata penduduk Kebumen yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,85 tahun atau telah mampu mengenyam pendidikan sampai kelas VII (putus sekolah di kelas VIII). Meskipun capaian RLS tersebut masih harus ditingkatkan, namun pada sisi lain capaian HLS Kebumen memberikan harapan yang lebih cerah, yaitu sebesar 13,36. Hal ini berarti secara rata-rata anak berusia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan pada tahun 2022 diharapkan mampu bersekolah hingga 13,36 tahun atau setara Diploma I.

Dimensi ketiga pembentuk IPM adalah standar hidup layak yang diukur melalui indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Capaian Kebumen dalam dimensi ini pada tahun 2022 sebesar 9,28 juta rupiah/kapita/tahun. Pada dasarnya capaian dimensi ini tercatat tumbuh positif sebesar 2,81 persen dibandingkan dengan tahun 2021. Akan tetapi, secara umum capaian Kebumen dalam dimensi ini masih menjadi tantangan. Selama lima tahun terakhir, capaian dimensi ini selalu lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar dan Jawa Tengah secara keseluruhan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus melakukan berbagai terobosan baru untuk meningkatkan standar hidup layak masyarakat. Berbagai terobosan baru tersebut khususnya terkait dengan upaya-upaya pengentasan dan penanggulangan kemiskinan serta penciptaan dan perluasan lapangan pekerjaan.

<https://kebumenkab.go.id>

# Referensi



<https://kebumenkab.bps.go.id>

<https://kebumenkab.bps.go.id>

## REFERENSI

- Blum, Hendrik L. 1974. *Planning for Health, Development and Application of Social Changes Theory*. New York: Human Sciences Press.
- Haq, Mahbub ul. 1995. *Reflections on Human Development*. New York: Oxford University Press.
- Jaba, Elisabeta, Christiana Brigitte Balan, Ioan-Bogdan Robu. 2014. *The Relationship between Life Expectancy at Birth and Health Expenditures Estimated by A Cross-Country and Time-Series Analysis*. *Procedia Economics and Finance*, 15: 108 – 114.
- Jen, M.H. dkk. 2010. *International Variations in Life Expectancy: A Spatio – Temporal Analysis*. *Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie* 101(1), p. 73.
- Mohan, Ramesh dan Sam Mirmirani. 2007. *An Assessment of OECD Health Care System Using Panel Data Analysis*. *Southwest Business & Economics Journal*. 16, p. 21.
- Sen, A. 2003. *Development as Capability Expansion*. New Delhi and New York: Oxford University Press.
- Todaro, Michel P. dan Stepen C. Smith. 2003. *Economic Development* (Eighth Edition). Newyork: Pearson.
- United Nations Development Programme. 1990. *Human Development Report 1990*. New York: UNDP

<https://kebumenkab.bps.go.id>

# Lampiran





<https://kebumenkab.bps.go.id>

**Lampiran 1. Usia Harapan Hidup (UHH) menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2017 – 2022**

Kabupaten / Kota	Usia Harapan Hidup saat Lahir (tahun)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Cilacap	73.24	73.39	73.52	73.73	73.90	74.07
Kabupaten Banyumas	73.33	73.45	73.55	73.72	73.80	73.88
Kabupaten Purbalingga	72.91	72.98	73.02	73.14	73.21	73.28
Kabupaten Banjarnegara	73.79	73.91	74.01	74.18	74.28	74.37
Kabupaten Kebumen	72.98	73.11	73.22	73.40	73.55	73.70
Kabupaten Purworejo	74.26	74.40	74.52	74.72	74.87	75.03
Kabupaten Wonosobo	71.30	71.46	71.60	71.82	71.94	72.05
Kabupaten Magelang	73.39	73.47	73.56	73.72	73.88	74.03
Kabupaten Boyolali	75.72	75.79	75.83	75.95	76.03	76.12
Kabupaten Klaten	76.62	76.67	76.68	76.78	76.86	76.95
Kabupaten Sukoharjo	77.49	77.54	77.55	77.65	77.73	77.82
Kabupaten Wonogiri	76.00	76.05	76.07	76.16	76.28	76.41
Kabupaten Karanganyar	77.31	77.36	77.38	77.47	77.55	77.64
Kabupaten Sragen	75.55	75.60	75.62	75.71	75.79	75.87
Kabupaten Grobogan	74.46	74.55	74.61	74.75	74.84	74.93
Kabupaten Blora	73.99	74.12	74.23	74.41	74.51	74.60
Kabupaten Rembang	74.32	74.39	74.43	74.55	74.61	74.68
Kabupaten Pati	75.80	75.93	76.04	76.22	76.27	76.32
Kabupaten Kudus	76.44	76.47	76.50	76.60	76.68	76.76
Kabupaten Jepara	75.68	75.71	75.74	75.84	75.91	75.97
Kabupaten Demak	75.27	75.29	75.31	75.40	75.46	75.52
Kabupaten Semarang	75.57	75.62	75.63	75.73	75.79	75.86
Kabupaten Temanggung	75.42	75.47	75.48	75.58	75.64	75.70
Kabupaten Kendal	74.24	74.30	74.33	74.43	74.48	74.53
Kabupaten Batang	74.50	74.56	74.59	74.69	74.74	74.79
Kabupaten Pekalongan	73.46	73.53	73.57	73.69	73.74	73.80
Kabupaten Pemalang	72.98	73.11	73.22	73.40	73.53	73.65
Kabupaten Tegal	71.14	71.28	71.40	71.60	71.72	71.85
Kabupaten Brebes	68.61	68.84	69.04	69.33	69.54	69.74
Kota Magelang	76.66	76.72	76.75	76.85	76.93	77.02
Kota Surakarta	77.06	77.11	77.12	77.22	77.32	77.43
Kota Salatiga	76.98	77.11	77.22	77.40	77.55	77.72
Kota Semarang	77.21	77.23	77.25	77.34	77.51	77.69
Kota Pekalongan	74.19	74.25	74.28	74.38	74.44	74.51
Kota Tegal	74.23	74.30	74.34	74.46	74.54	74.64
<b>PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>74.08</b>	<b>74.18</b>	<b>74.23</b>	<b>74.37</b>	<b>74.47</b>	<b>74.57</b>

**Lampiran 2. Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2017 – 2022**

Kabupaten / Kota	Harapan Lama Sekolah (tahun)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Cilacap	12.30	12.48	12.49	12.50	12.63	12.66
Kabupaten Banyumas	12.63	12.64	12.82	12.85	13.03	13.21
Kabupaten Purbalingga	11.94	11.95	11.98	11.99	12.00	12.01
Kabupaten Banjarnegara	11.41	11.42	11.45	11.46	11.63	11.81
Kabupaten Kebumen	12.90	12.91	13.04	13.34	13.35	13.36
Kabupaten Purworejo	13.47	13.48	13.49	13.50	13.51	13.52
Kabupaten Wonosobo	11.68	11.69	11.74	11.75	11.76	11.78
Kabupaten Magelang	12.47	12.48	12.53	12.54	12.55	12.58
Kabupaten Boyolali	12.15	12.16	12.43	12.56	12.57	12.62
Kabupaten Klaten	12.97	13.13	13.24	13.25	13.39	13.40
Kabupaten Sukoharjo	13.80	13.81	13.82	13.83	13.84	13.90
Kabupaten Wonogiri	12.44	12.45	12.48	12.49	12.50	12.51
Kabupaten Karanganyar	13.65	13.66	13.67	13.68	13.69	13.70
Kabupaten Sragen	12.64	12.65	12.69	12.83	12.84	12.91
Kabupaten Grobogan	12.27	12.28	12.29	12.30	12.44	12.45
Kabupaten Blora	12.13	12.14	12.19	12.20	12.35	12.44
Kabupaten Rembang	12.04	12.05	12.10	12.11	12.12	12.13
Kabupaten Pati	12.29	12.30	12.41	12.65	12.94	12.95
Kabupaten Kudus	13.20	13.21	13.22	13.23	13.24	13.25
Kabupaten Jepara	12.70	12.71	12.74	12.75	12.76	12.77
Kabupaten Demak	12.54	12.86	13.01	13.31	13.32	13.33
Kabupaten Semarang	12.84	12.85	12.94	12.97	12.98	13.04
Kabupaten Temanggung	12.07	12.08	12.13	12.14	12.32	12.55
Kabupaten Kendal	12.69	12.70	12.80	12.95	12.96	12.97
Kabupaten Batang	11.87	11.88	12.00	12.01	12.13	12.14
Kabupaten Pekalongan	12.16	12.17	12.40	12.41	12.42	12.43
Kabupaten Pemasang	11.88	11.91	11.94	11.95	11.96	11.98
Kabupaten Tegal	12.06	12.34	12.58	12.67	12.89	12.91
Kabupaten Brebes	11.69	12.02	12.03	12.04	12.05	12.15
Kota Magelang	13.79	13.80	13.81	14.14	14.15	14.31
Kota Surakarta	14.51	14.52	14.55	14.87	14.88	14.89
Kota Salatiga	14.99	15.00	15.34	15.41	15.42	15.43
Kota Semarang	15.20	15.50	15.51	15.52	15.53	15.54
Kota Pekalongan	12.78	12.79	12.83	12.84	12.85	12.86
Kota Tegal	12.89	12.90	13.04	13.05	13.07	13.08
<b>PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>12.57</b>	<b>12.63</b>	<b>12.68</b>	<b>12.70</b>	<b>12.77</b>	<b>12.81</b>

**Lampiran 3. Rata-rata Lama Sekolah (HLS) menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2017 – 2022**

Kabupaten / Kota	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Cilacap	6.91	6.92	6.93	6.97	7.09	7.18
Kabupaten Banyumas	7.40	7.41	7.42	7.52	7.63	7.78
Kabupaten Purbalingga	6.87	7.00	7.14	7.24	7.25	7.33
Kabupaten Banjarnegara	6.27	6.28	6.50	6.74	6.75	6.84
Kabupaten Kebumen	7.29	7.34	7.53	7.54	7.55	7.85
Kabupaten Purworejo	7.69	7.70	7.91	8.12	8.21	8.32
Kabupaten Wonosobo	6.51	6.75	6.76	6.81	6.82	6.88
Kabupaten Magelang	7.41	7.57	7.77	7.78	7.79	7.81
Kabupaten Boyolali	7.44	7.55	7.56	7.84	7.85	8.08
Kabupaten Klaten	8.23	8.24	8.31	8.58	8.81	9.09
Kabupaten Sukoharjo	8.71	8.84	9.10	9.34	9.35	9.62
Kabupaten Wonogiri	6.68	6.88	7.04	7.33	7.34	7.42
Kabupaten Karanganyar	8.50	8.51	8.52	8.56	8.57	8.79
Kabupaten Sragen	7.04	7.22	7.34	7.65	7.66	7.79
Kabupaten Grobogan	6.66	6.67	6.86	6.91	7.11	7.26
Kabupaten Blora	6.45	6.46	6.58	6.83	6.99	7.01
Kabupaten Rembang	6.94	6.95	7.15	7.16	7.30	7.41
Kabupaten Pati	7.08	7.18	7.19	7.44	7.48	7.79
Kabupaten Kudus	8.31	8.62	8.63	8.75	8.76	9.06
Kabupaten Jepara	7.33	7.43	7.44	7.68	7.79	8.09
Kabupaten Demak	7.47	7.48	7.55	7.71	7.86	8.10
Kabupaten Semarang	7.87	7.88	8.01	8.02	8.03	8.05
Kabupaten Temanggung	6.90	6.94	7.15	7.24	7.25	7.41
Kabupaten Kendal	6.85	7.05	7.25	7.45	7.46	7.71
Kabupaten Batang	6.61	6.62	6.63	6.87	6.88	6.90
Kabupaten Pekalongan	6.73	6.74	6.88	6.91	7.17	7.46
Kabupaten Pemasang	6.31	6.32	6.41	6.42	6.45	6.50
Kabupaten Tegal	6.55	6.70	6.86	6.98	6.99	7.25
Kabupaten Brebes	6.18	6.19	6.20	6.21	6.22	6.35
Kota Magelang	10.30	10.31	10.33	10.39	10.62	10.94
Kota Surakarta	10.38	10.53	10.54	10.69	10.90	10.92
Kota Salatiga	10.15	10.40	10.41	10.42	10.66	10.95
Kota Semarang	10.50	10.51	10.52	10.53	10.78	10.80
Kota Pekalongan	8.56	8.57	8.71	8.96	9.18	9.20
Kota Tegal	8.29	8.30	8.31	8.51	8.73	9.00
<b>PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>7.27</b>	<b>7.35</b>	<b>7.53</b>	<b>7.69</b>	<b>7.75</b>	<b>7.93</b>

**Lampiran 4. Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2017 – 2022**

Kabupaten / Kota	Pengeluaran per kapita Disesuaikan (ribu rupiah/orang/tahun)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Cilacap	9 896	10 274	10 639	10 440	10 534	10 904
Kabupaten Banyumas	19 713	11 240	11 703	11 448	11 546	11 905
Kabupaten Purbalingga	9 340	9 786	10 131	9 914	10 032	10 277
Kabupaten Banjarnegara	8 630	9 160	9 547	9 263	9 407	9 776
Kabupaten Kebumen	8 446	8 757	9 066	8 901	9 028	9 282
Kabupaten Purworejo	9 601	10 048	10 342	10 163	10 275	10 671
Kabupaten Wonosobo	9 969	10 503	10 871	10 621	10 760	11 108
Kabupaten Magelang	8 627	9 025	9 387	9 301	9 440	10 011
Kabupaten Boyolali	12 262	12 758	13 079	12 910	13 031	13 250
Kabupaten Klaten	11 369	11 738	12 074	11 921	12 017	12 522
Kabupaten Sukoharjo	10 765	11 100	11 557	11 325	11 428	11 841
Kabupaten Wonogiri	8 765	9 117	9 426	9 286	9 429	9 780
Kabupaten Karanganyar	10 933	11 223	11 569	11 428	11 509	11 798
Kabupaten Sragen	12 041	12 391	12 720	12 589	12 679	13 052
Kabupaten Grobogan	9 716	10 097	10 350	10 221	10 294	10 610
Kabupaten Blora	9 065	9 385	9 795	9 571	9 669	10 067
Kabupaten Rembang	9 736	10 191	10 551	10 328	10 519	10 937
Kabupaten Pati	9 813	10 190	10 660	10 390	10 506	10 948
Kabupaten Kudus	10 639	10 979	11 318	11 160	11 272	11 609
Kabupaten Jepara	9 745	10 169	10 609	10 343	10 536	10 913
Kabupaten Demak	9 544	10 001	10 344	10 128	10 248	10 698
Kabupaten Semarang	11 389	11 807	12 116	11 966	12 070	12 448
Kabupaten Temanggung	8 794	9 142	9 489	9 343	9 408	9 773
Kabupaten Kendal	10 863	11 257	11 597	11 425	11 608	11 999
Kabupaten Batang	8 805	9 203	9 573	9 431	9 524	9 972
Kabupaten Pekalongan	9 702	10 221	10 508	10 312	10 409	10 707
Kabupaten Pemasang	7 785	8 186	8 546	8 461	8 573	8 994
Kabupaten Tegal	9 136	9 433	9 798	9 612	9 700	10 020
Kabupaten Brebes	9 554	9 890	10 238	10 058	10 152	10 514
Kota Magelang	11 525	11 994	12 514	12 210	12 349	12 816
Kota Surakarta	13 986	14 528	15 049	14 761	14 911	15 463
Kota Salatiga	14 921	15 464	15 944	15 699	15 843	16 351
Kota Semarang	14 334	14 895	15 550	15 243	15 425	16 047
Kota Pekalongan	11 800	12 312	12 680	12 467	12 598	13 158
Kota Tegal	12 283	12 830	13 250	12 999	13 143	13 455
<b>PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>10 377</b>	<b>10 777</b>	<b>11 102</b>	<b>10 930</b>	<b>11 034</b>	<b>11 377</b>

**Lampiran 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2017 – 2022**

Kabupaten / Kota	Indeks Pembangunan Manusia					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Cilacap	68.90	69.56	69.98	69.95	70.42	70.99
Kabupaten Banyumas	70.75	71.30	71.96	71.98	72.44	73.17
Kabupaten Purbalingga	67.72	68.41	68.99	68.97	69.15	69.54
Kabupaten Banjarnegara	65.86	66.54	67.34	67.45	67.86	68.61
Kabupaten Kebumen	68.29	68.80	69.60	69.81	70.05	70.79
Kabupaten Purworejo	71.31	71.87	72.50	72.68	72.98	73.60
Kabupaten Wonosobo	66.89	67.81	68.27	68.22	68.43	68.89
Kabupaten Magelang	68.39	69.11	69.87	69.87	70.12	70.85
Kabupaten Boyolali	72.64	73.22	73.80	74.25	74.40	74.97
Kabupaten Klaten	74.25	74.79	75.29	75.56	76.12	76.95
Kabupaten Sukoharjo	75.56	76.07	76.84	76.98	77.13	77.94
Kabupaten Wonogiri	68.66	69.37	69.98	70.25	70.49	71.04
Kabupaten Karanganyar	75.22	75.54	75.89	75.86	75.99	76.58
Kabupaten Sragen	72.40	72.96	73.43	73.95	74.08	74.65
Kabupaten Grobogan	68.87	69.32	69.86	69.87	70.41	70.97
Kabupaten Blora	67.52	67.95	68.65	68.84	69.37	69.95
Kabupaten Rembang	68.95	69.46	70.15	70.02	70.43	71.00
Kabupaten Pati	70.12	70.71	71.35	71.77	72.28	73.14
Kabupaten Kudus	73.84	74.58	74.94	75.00	75.16	75.89
Kabupaten Jepara	70.79	71.38	71.88	71.99	72.36	73.15
Kabupaten Demak	70.41	71.26	71.87	72.22	72.57	73.36
Kabupaten Semarang	73.20	73.61	74.14	74.10	74.24	74.67
Kabupaten Temanggung	68.34	68.83	69.56	69.57	69.88	70.77
Kabupaten Kendal	70.62	71.28	71.97	72.29	72.50	73.19
Kabupaten Batang	67.35	67.86	68.42	68.65	68.92	69.45
Kabupaten Pekalongan	68.40	68.97	69.71	69.63	70.11	70.81
Kabupaten Pemasang	65.04	65.67	66.32	66.32	66.56	67.19
Kabupaten Tegal	66.44	67.33	68.24	68.39	68.79	69.53
Kabupaten Brebes	64.86	65.68	66.12	66.11	66.32	67.03
Kota Magelang	77.84	78.31	78.80	78.99	79.43	80.39
Kota Surakarta	80.85	81.46	81.86	82.21	82.62	83.08
Kota Salatiga	81.68	82.41	83.12	83.14	83.60	84.35
Kota Semarang	82.01	82.72	83.19	83.05	83.55	84.08
Kota Pekalongan	73.77	74.24	74.77	74.98	75.40	75.90
Kota Tegal	73.95	74.44	74.93	75.07	75.52	76.15
<b>PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>70.52</b>	<b>71.12</b>	<b>71.73</b>	<b>71.87</b>	<b>72.16</b>	<b>72.79</b>

<https://kebumenkab.bps.go.id>

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



***Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Kebumen***

JL. Arungbinang No. 17 A, Kebumen 54311. Telp/Fax: (0287) 381163  
Homepage: <http://kebumenkab.bps.go.id> Email: [bps3305@bps.go.id](mailto:bps3305@bps.go.id)